

## **ANALISIS KELUARNYA AMERIKA SERIKAT DARI PARIS AGREEMENT DI ERA DONALD TRUMP**

Nurul Azhiimi

Hubungan Internasional,  
Universitas Potensi Utama, Medan  
Email : nurulazhiimi@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penarikan diri oleh Amerika Serikat (AS) dari Paris Agreement cukup mengejutkan dunia dan tentu memberi dampak yang cukup besar terhadap kesepakatan ini mengingat AS merupakan negara penghasil emisi karbondioksida terbesar kedua di dunia setelah China yaitu sekitar 5,82 miliar ton emisi CO<sub>2</sub> per tahun. AS menjadi salah satu negara yang ikut dalam kesepakatan mengenai pengurangan emisi karbondioksida ini, bahkan menjadi negara paling awal ketika meratifikasi Paris Agreement. Namun pada tahun 2017 Donald Trump mengumumkan secara resmi AS keluar dari Paris Agreement. Keputusan ini mewarnai berita media cetak, media elektronik dan media sosial di seluruh dunia. Keputusan ini tidaklah terlalu mengejutkan. Sejak masih menjadi calon Presiden AS, Trump dan para pendukungnya telah mengancam akan membatalkan keikutsertaan AS dalam kesepakatan iklim global ini. Trump mengatakan bahwa Paris Agreement merupakan kesepakatan yang buruk (bad deal) bagi AS. Trump mengutip hasil kajian NERA Consulting yang mengatakan Amerika dirugikan \$3 triliun dalam beberapa dekade mendatang, dan kehilangan 6,5 juta kesempatan kerja. Keputusan Trump ini sesungguhnya bertentangan dengan pendapat mayoritas warga AS yang justru tidak menghendaki negaranya keluar dari Paris Agreement. Dalam survei yang dilakukan Harvard School of Public Health dan Politico pada tahun 2017 lalu, sekitar 62% warga AS menghendaki tetap ikut dalam Paris Agreement.

**Kata kunci** : perjanjian paris, perubahan iklim, Donald Trump.

### **ABSTRACT**

The withdrawal by the United States (US) from the Paris Agreement surprised the world and certainly had a considerable impact on this agreement considering that the US is the second largest emitter of carbon dioxide in the world after China, which is around 5.82 billion tons of CO<sub>2</sub> emissions per year. The US became one of the countries participating in the agreement on reducing carbon dioxide emissions, and even became the first country to ratify the Paris Agreement. But in 2017 Donald Trump officially announced the US was leaving the Paris Agreement. This decision colors the news in print media, electronic media and social media around the world. This decision is not too surprising. Since he was a candidate for US President, Trump and his supporters have threatened to cancel US participation in this global climate agreement. Trump said that the Paris Agreement was a bad deal for the US. Trump cited the results of a NERA Consulting study which said America would lose \$3 trillion in the next few decades, and lose 6.5 million job opportunities. Trump's decision actually contradicts the opinion of the majority of US citizens who do not want their country to leave the Paris Agreement. In a survey conducted by the Harvard School of Public Health and Politico in 2017, around 62% of US citizens wanted to remain in the Paris Agreement.

**Keywords**: paris agreement, climate change, Donald Trump

## PENDAHULUAN

Penarikan diri oleh Amerika Serikat (AS) dari *Paris Agreement* cukup mengejutkan negara dunia dan tentu memberi dampak yang cukup besar terhadap misi kesepakatan ini mengingat AS merupakan negara penghasil emisi karbondioksida terbesar kedua di dunia setelah China yaitu sekitar 5,82 miliar ton emisi CO<sub>2</sub> per tahun. AS menjadi salah satu negara yang ikut dalam kesepakatan mengenai pengurangan emisi karbondioksida ini, bahkan menjadi negara paling awal ketika meratifikasi *Paris Agreement*. Saat AS memutuskan untuk bergabung dengan *Paris Agreement* negara ini berada di bawah kepemimpinan Barack Hussein Obama. Namun ketika kepemimpinan itu berpindah, pada tahun 2017 AS oleh pemimpinnya saat itu, Donald Trump mengumumkan secara resmi AS keluar dari *Paris Agreement*. Keputusan ini mewarnai berita media cetak, media elektronik dan media sosial di seluruh dunia sepanjang akhir pekan lalu. Berbagai komentar dari pemimpin-pemimpin negara maju dan berkembang, para tokoh politik, akademisi asal AS dan negara lain memenuhi berbagai kanal pemberitaan. Keputusan ini tidaklah terlalu mengejutkan. Sejak masih menjadi calon Presiden AS, Trump dan para pendukungnya telah mengancam akan membatalkan keikutsertaan AS dalam kesepakatan iklim *global* ini. Apa yang dilakukan Trump adalah pelaksanaan janji kampanyenya. Trump mengatakan bahwa *Paris Agreement* merupakan kesepakatan yang buruk (*bad deal*) bagi AS. Dia beralasan

keikutsertaan AS dalam perjanjian ini berdampak terhadap daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Trump mengutip hasil kajian NERA *Consulting* yang mengatakan Amerika dirugikan \$3 triliun dalam beberapa dekade mendatang, dan kehilangan 6,5 juta kesempatan kerja.

Keputusan Trump ini sesungguhnya bertentangan dengan pendapat mayoritas warga AS yang justru tidak menghendaki negaranya keluar dari *Paris Agreement*. Dalam survei yang dilakukan *Harvard School of Public Health dan Politico* pada tahun 2017 lalu, sekitar 62 persen warga AS menghendaki tetap ikut dalam *Paris Agreement*. Survei lain juga menemukan bahwa para pemilih AS mendukung untuk tetap ikut serta dalam *Paris Agreement* dengan rasio 5 berbanding 1 dengan pemilih yang tidak setuju.

## TINJAUAN PUSTAKA

Analisis Keluarnya Negara Amerika Serikat Dari *Paris Agreement* Ditengah Ketidak Pastian Hasil Pemilihan Umum Amerika Tahun 2020.

*Paris Agreement* merupakan sebuah metode kerjasama antar negara di dunia dalam mengatasi problematika iklim yang semakin krisis. Keputusan yang diambil Amerika Serikat hanya semata-mata mementingkan kebutuhan negaranya saja tanpa melihat resiko yang ditimbulkan bagi lingkungan hidup terutama pada aspek perubahan iklim global. *Paris Agreement* merupakan bisa menjadi solusi yang dapat mengatasi permasalahan tersebut walaupun

hasil yang dicapai belum dapat sesuai dengan tujuan. Tindakan dalam keikutsertaan di dalam Paris Agreement merupakan sebuah langkah dalam menyelamatkan perubahan iklim yang semakin krisis. Kepentingan ekonomi memang menjadi salah satu penunjang kemakmuran sebuah negara, tetapi kita juga harus melihat kilas balik yang ditimbulkan jika terlalu berlebihan dalam menghasilkan emisi. Keluarnya Amerika akan memberikan dampak yang cukup terasa bagi negara-negara lain sebab, Amerika merupakan negara penyumbang dana dalam Paris Agreement tersebut dalam membantu negara-negara lain yang membutuhkan bantuan k etika masa kepemimpinan Barack Hussein Obama. Jika Amerika Serikat keluar dari perjanjian tersebut, perubahan iklim akan semakin menjadi-jadi, mengingat Amerika penyumbang emisi dengan posisinya terbesar ke-2 di dunia. Ekspor minyak dan batu bara Amerika akan meningkat karena kebutuhan perekonomian mereka dan hal tersebut juga menyebabkan perubahan iklim juga mengalami peningkatan tajam pula.

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump Keluar Dari Paris Agreement (COP-21). Paris Agreement merupakan pencapaian tertinggi negosiasi satu dekade terakhir dunia internasional untuk pengaturan upaya penurunan emisi dan pengendalian perubahan iklim, kesepakatan itu bersifat adil, seimbang dan berlaku untuk semua pihak. Tujuan Paris Agreement adalah menguatkan respon global terhadap

ancaman perubahan iklim dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan usaha untuk memberantas kemiskinan.

Tujuan tersebut dilakukan melalui tiga usaha yang terdapat dalam dokumen Paris Agreement article 2. Pertama, membatasi kenaikan suhu global dibawah 2°C dari tingkat pre-industri dan melakukan upaya untuk membatasi hingga dibawah 1,5°C. Kedua, peningkatan kemampuan untuk beradaptasi terhadap efek perubahan iklim dalam produksi pangan. Ketiga, membuat alur keuangan yang konsisten menuju emisi gas rumah kaca yang rendah. Implementasi Paris Agreement dengan prinsip *common but differentiated responsibilities* dan *respective capabilities* dalam kondisi perbedaan nasional.

Setiap negara yang terlibat menyampaikan kontribusi penurunan emisinya setiap lima tahun sekali dan harus menyampaikan komitmen dan kontribusi nasionalnya. Dalam article 20 Paris Agreement masa untuk meratifikasi bagi setiap negara dimulai tanggal 22 April 2016 hingga 21 April 2017. Dalam article 21 menyebutkan kesepakatan akan diberlakukan (*Enter Into Force*) sebulan setelah lebih kurang 55 negara yang mewakili 55% emisi global meratifikasinya. Berarti butuh usaha yang tinggi untuk tercapainya syarat pemberlakuan.

Paris Agreement yang didukung dengan diratifikasi oleh Amerika dibawah Presiden Barack Hussein Obama, menuju ketidakpastian karena terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ini karena Trump dikenal luas sebagai tokoh

yang tidak percaya dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Hal itu tercermin dengan berbagai pernyataannya, baik sebelum dan selama kampanyenya menjelang pilpres kemarin Donald Trump juga mengklaim bahwa global warming itu hanyalah Hoax, walaupun banyak organisasi internasional seperti PBB, WHO, World Meteorologi Organization, NASA, PENTAGON, tiga puluh enam peraih penghargaan nobel dan akademi sains nasional dari negara seperti Cina, Rusia, Amerika Serikat, Brazil, Meksiko, Jepang, Indonesia, Inggris dan lain lain, membenarkan bahwa climate change atau global warming adalah ancaman yang nyata dan bahwa kegiatan manusia adalah penyebab utamanya.

Saat mengumumkan keluarnya dari Paris Agreement, Donald Trump mengatakan bahwa Paris Agreement merupakan kesepakatan yang buruk bagi AS Trump beralasan keikutsertaan AS dalam perjanjian ini berdampak terhadap daya saing ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Pada tanggal 1 Juni 2017, Presiden Donald Trump resmi mengumumkan untuk keluar dari kesepakatan Paris Agreement. Keputusan ini tidaklah terlalu mengejutkan karena sejak masih menjadi calon Presiden AS, Trump dan para pendukungnya telah mengancam akan membatalkan keikutsertaan AS dalam kesepakatan iklim global ini. Donald Trump melaksanakan yang ia janjikan saat kampanyenya.

Keputusan Trump ini sesungguhnya bertentangan dengan pendapat mayoritas

warga AS yang justru tidak menghendaki negaranya keluar dari Paris Agreement.

Kepentingan perusahaan minyak dan gas memiliki pengaruh yang jelas pada Partai Republik. Sebagian besar uang dari perusahaan bahan bakar fosil mengalir ke anggota Kongres Republik, Selama 16 tahun terakhir, Pengeluaran yang besar dari kepentingan yang sangat terkonsentrasi ini, mengarah pada hasil kebijakan publik yang mencerminkan prioritas individu dan kepentingan perusahaan terkait. Kebijakan-kebijakan ini kemudian dipelihara melalui akses reguler ke pembuat kebijakan di mana industri memanfaatkannya untuk memprioritaskan pengembangan bahan bakar fosil.

Industri minyak dan gas secara strategis mengakuisisi pengaruh dan mengerahkan kekuatan melalui upaya lobi di Capitol Hill. tindakan mencari pengaruh para pengambil keputusan cenderung menguntungkan kepentingan perusahaan karena sumber daya mereka yang banyak. Korporasi secara luas menghabiskan lebih dari \$2,6 miliar untuk melobi setiap tahun menurut pengungkapan baru-baru ini.

Keluarnya AS dari Paris Agreement berdampak pada prospek terhadap Paris Agreement, kebijakan lingkungan di Amerika Serikat, kebijakan iklim global, dan citra AS di perjanjian iklim selanjutnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, penelitian ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang dilandasi oleh fenomena

sosial di masyarakat dunia internasional saat ini. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena dapat digunakan untuk mengobservasi fakta yang terjadi di dunia internasional dibantu dengan teori dalam menganalisa fenomena tersebut, dengan menggabungkan pandangan, teori dan ide untuk menganalisa suatu fenomena maka akan menghasilkan suatu kesimpulan yang berbentuk pengetahuan baru. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data kepustakaan, seperti: buku, jurnal, hasil penelitian, dan data dari situs-situs internet.

### **TEORI RATIONAL CHOICE**

Negara dalam melakukan tindakannya dalam konteks hubungan internasional tentu memerlukan sebuah pedoman dan arah yang sangat solid agar dapat mencapai tujuan dan cita-citanya yang diinginkannya, mengingat

Interaksi yang dilakukan dalam hubungan Internasional tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mendapatkan keinginan dan keperluan serta kebutuhan dari masing-masing negara, karena negara adalah sebuah institusi sosial yang dibangun oleh manusia yang juga merupakan seorang makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa peran dan posisi dari manusia lain juga (Quackenbush, 2004). Oleh karena itu, negara bagaimanapun harus selalu berusaha untuk memprioritaskan dirinya masing-masing dan menjaga dan mempertahankan keselamatan dirinya. Di balik tindakan negara yang solid dan konstan dalam hubungan internasional, tentu harus ada

aktor atau seseorang yang menyusun kepentingan negara tersebut. Aktor yang memiliki posisi dalam menentukan arah dan kebijakan yang dilakukan oleh negara dalam konteks internasional harus bersifat rasional, yang harus menggunakan akal budinya untuk menemukan dan menghasilkan dan menciptakan jalan yang terbaik agar dapat diambil oleh negara yang dipimpin atau dikuasainya sebagai salah satu cara untuk mempertahankan eksistensi dari negara tersebut (Dugis, 2016). Terdapat sebuah teori yang berfokus kepada rasionalitas yang dimiliki oleh seseorang dalam bertindak dan menghasilkan tindakan bagi suatu negaranya dengan berusaha memaksimalkan keuntungan atau kemenangan dan di saat yang bersamaan juga harus

mengurangi kerugian atau kehilangan yang dialami oleh negaranya. Teori tersebut disebut dengan Rational Choice Theory. Rational Choice Theory merupakan sebuah teori yang berfokus kepada bagaimana pilihan yang dibentuk oleh rasionalitas seseorang berpengaruh terhadap tindakan negaranya. Terdapat berbagai macam jenis Rational Choice Theory dalam menentukan keputusan. Rational Choice yang diambil dan dilakukan oleh seseorang juga diambil dan dilakukanserta dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Terdapat keputusan yang dipengaruhi oleh berbagai macam faktor internal dari seseorang, yang berkuasa seperti tipe dari kepribadian, pengetahuan, pemikiran dan pandangan terhadap suatu isu atau permasalahan tertentu. Terdapat juga berbagai macam faktor eksternal yang

mempengaruhi seseorang berpikir seperti kondisi dan situasi tertentu yang ada di dalam negaranya dan kebudayaan yang ada di negaranya dan lain sebagainya (Guzman, 2008). Jenis pertama dari Rational Choice adalah Das Sein dan Das Sollen, yang merupakan bahasa Jerman yang berarti apa yang ada dan apa yang seharusnya. Adapun seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan fakta yang ada yang dialaminya dalam suatu negara yang menurutnya dapat mengancam keamanan dan pertahanannya. Dapat dikatakan bahwa Rational Choice Theory merupakan sebuah teori yang berfokus kepada keputusan rasional yang diambil oleh individu dalam tindakan yang dimainkan atas nama negaranya dan bahwa keputusan ini merupakan salah satu cara untuk mendapatkan kepentingan nasional bagi negaranya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### ***Sistem Pemerintahan Amerika Serikat***

Amerika Serikat sendiri merupakan negara besar yang mempunyai kapasitas ekonomi yang besar dan juga sebagai negara superpower yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam tatanan sistem internasional. Negara tersebut juga dianggap sebagai negara multikultural karena banyaknya imigran dari berbagai negara lain yang datang ke Amerika untuk menetap. Amerika Serikat juga merupakan negara yang menganut ideologi liberalisme sehingga membuat konsep demokrasi, pemerintahan yang terbatas, dan kebebasan berekspresi sangatlah kuat mengakar dalam dasar negara tersebut.

Terdapat aturan dasar yang mengatur jalannya pemerintahan secara keseluruhan dan menjadi dasar hukum dari Amerika Serikat, aturan dasar tersebut dikenal dengan konstitusi dalam pemerintahan Amerika Serikat. Konstitusi tersebut dibentuk semenjak tahun 1788, konstitusi tersebut bukan hanya sebagai sumber kekuasaan pemerintahan tetapi juga sebagai aturan dasar pemerintah untuk melindungi hak dari masyarakat sipil sehingga kekuasaan pemerintah dapat dibatasi dan mencegah adanya penyalahgunaan penggunaan kekuasaan pemerintah.

Sistem politik Amerika Serikat sendiri menggunakan sistem bikameral atau sering dikenal dengan Kongres dalam pemerintahan Amerika Serikat, dalam kongres tersebut terdapat House of Representative dan Senate. Kongres Amerika Serikat terdiri dari 535 anggota, yang dibagi dalam 435 anggota House of Representative dan 100 anggota Senate. Dalam setiap kamar di kongres tersebut terdapat Partai mayoritas dan minoritas yang menguasai proses pengambilan keputusan di setiap kebijakan yang dibentuk, Partai mayoritas dan minoritas akan ditentukan oleh banyaknya anggota Partai yang menduduki kursi jabatan di dalam House of Representative dan Senate.

Anggota House of Representative mempunyai wewenang untuk mengajukan pendapatan UU, memanggil pejabat pemerintahan untuk dimintai pertanggungjawabannya, dan memilih Presiden saat tidak ada mayoritas dalam Electoral College. Sedangkan Senate

mempunyai wewenang dalam persetujuan ratifikasi dalam suatu perjanjian, menyetujui pengangkatan pejabat pemerintahan. Disahkannya suatu undang-undang maupun pengesahan suatu perjanjian harus dapat disetujui terlebih dahulu oleh kedua Houses dalam Kongres Amerika Serikat.

Dalam sistem politik Amerika yang bikameral tersebut terdapat dua Partai besar yang saling memperebutkan pengaruh untuk dapat mendominasi arah kebijakan dari pemerintahan Amerika Serikat, dua Partai tersebut adalah Partai Demokrat dan Partai Republik. Kedua Partai tersebut dinilai sebagai kelompok kepentingan yang sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Amerika baik itu kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri.

Perbedaan yang sangat signifikan dalam budaya politik dari kedua Partai tersebut yang tentu sangat mempengaruhi tujuan dan sasaran kebijakan luar negeri yang diambil. Seperti pada Partai Demokrat yang mempunyai kebijakan yang lebih progresif dan lebih mendukung dengan masyarakat kalangan menengah ke bawah, sedangkan budaya politik Partai Republik yang lebih memperlihatkan kebijakan yang konservatif dan juga lebih mendukung masyarakat menengah ke atas. Kedua Partai besar tersebut saling bersaing untuk memperebutkan kursi jabatan dalam pemerintahan.

Salah satu hal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat adalah keadaan politiknya saat itu. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan dalam budaya politik mereka dalam mengambil

keputusan untuk mengeluarkan kebijakan luar negeri.

Tentu selain kongres yang diisi oleh anggota Senate dan House of Representative juga terdapat Presiden dari Amerika Serikat sendiri yang memutuskan arah dari kebijakan luar negerinya. Presiden juga mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri. Hal-hal seperti, idiosinkratik, latar belakang pendidikan, dan budaya politik Partai dari Presiden tersebut tentu akan mempengaruhi kebijakan luar negeri yang dibentuknya.

### ***Perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat***

Pada pemerintahan Barack Hussein Obama pada tahun 2008 dimana pada periode ini membawa harapan baru pada masyarakat internasional agar sikap Amerika Serikat dalam menghadapi perjanjian yang dihasilkan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) menjadi lebih positif.

Presiden Obama berasal dari Partai Demokrat. Hal ini menimbulkan Amerika Serikat yang lebih peduli terhadap isu lingkungan yang terjadi karena Partai Demokrat mempunyai fokus pada bidang serikat pekerja, kontrol senjata dan juga isu lingkungan. Dapat dilihat melalui kebijakan pro lingkungan yang dikeluarkan oleh Presiden ke 42 yaitu William Jefferson Clinton. Clinton dalam usulan pajak British Thermal Unit atau BTU yang dikeluarkan pada tahun 1993, BTU sendiri merupakan upaya pemerintahan Presiden Clinton untuk

memberikan pajak pada pencemar emisi gas rumah kaca berlebih. Walaupun kebijakan BTU tidak berhasil dikarenakan kongres yang tidak mendukung kebijakan tersebut, tetap saja dapat dikatakan bahwa Presiden Clinton merupakan presiden yang mempunyai sikap mendukung terhadap kebijakan yang memperbaiki dampak dari perubahan iklim dibandingkan dengan presiden-presiden Amerika Serikat sebelumnya.

Pada masa awal periode Presiden Obama menjabat yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 Presiden Obama tidak benar-benar mengeluarkan kebijakan yang mempunyai inisiatif untuk membantu UNFCCC dalam tujuannya mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Kerjasama antara Pemerintahan Amerika yang dipimpin oleh Presiden Obama dengan UNFCCC tidak berjalan dengan apa yang diharapkan sebelumnya karena ketiadaan kebijakan Amerika Serikat dalam perubahan iklim di area internasional.

Terlihat adanya kebijakan yang mendukung perubahan iklim dari Amerika Serikat seperti dalam peningkatan bantuan internasional dalam Reducing Emissions from Deforestation and Forest-Degradation (REDD) menjadi 300 Miliar dolar amerika dan menyumbang 3 miliar dolar amerika lainnya sebagai bantuan finansial dalam Green Climate Fund pada tahun 2014.<sup>94</sup> Walaupun begitu Amerika Serikat tetap menahan diri dari mendukung dan bergabung dengan perjanjian internasional yang mengikat mengenai kebijakan perubahan iklim, seperti halnya pada perjanjian yang dibentuk oleh UNFCCC.

Terdapat beberapa proposal kebijakan dari pemerintahan legislatif Amerika Serikat yang seharusnya dapat mendukung tujuan dari UNFCCC dengan mengurangi emisi gas rumah kaca dan penggunaan energi terbarukan, tetapi proposal-proposal tersebut pada akhirnya tidak dapat benar-benar terealisasi dan gagal akibat kurangnya dukungan dari Presiden Obama dan juga Kongres.

Sangat terlihat bahwa dalam masa periode pertama Presiden Obama memimpin Amerika Serikat tidak terdapat kebijakan luar negeri yang benar-benar secara efektif mendukung perbaikan dampak negatif dari perubahan iklim. Periode Presiden Obama yang dimulai semenjak tahun 2008 sampai pada tahun 2012 tersebut memperlihatkan sikap yang tidak terlalu mendukung terhadap perjanjian yang dikeluarkan oleh UNFCCC, terbukti dengan tidak adanya pengesahan maupun penandatanganan Protokol Kyoto oleh Amerika Serikat pada masa periode pertama Presiden Obama memimpin.

Tetapi sifat yang ditunjukkan oleh Presiden Obama dengan tidak mendukung perjanjian dari UNFCCC tidak seterusnya ditunjukkan dalam masa periode kedua dari kepemimpinannya. Barack Hussein Obama tidak hanya menjadi Presiden dari Amerika Serikat pada periode tahun 2008 sampai dengan 2012 saja, tetapi juga menjadi Presiden Amerika Serikat di periode keduanya pada tahun 2013 sampai dengan 2016. Dalam periode kedua dalam kepemimpinannya, Presiden Obama tidak menunjukkan sifat yang sama terhadap

UNFCCC, yaitu dengan menunjukkan sifat yang lebih mendukung dan positif terhadap perjanjian yang dibentuk oleh UNFCCC.

Keinginan untuk bekerja sama dengan UNFCCC dalam menghadapi perubahan iklim ditunjukkan oleh Presiden Obama dengan berbagai kebijakan, dimana salah satunya yang sangat berpengaruh bagi berjalannya perjanjian UNFCCC adalah dengan pengesahan Paris Agreement di tahun 2016. Pengesahan Paris Agreement oleh Amerika Serikat merupakan peristiwa penting, karena pengesahan Paris Agreement oleh Amerika Serikat secara tidak langsung telah membantu jalannya pelaksanaan Paris Agreement dengan menghilangkan hambatan terbesar dalam pengaplikasiannya yaitu Amerika Serikat itu sendiri.

Pengesahan Paris Agreement dilaksanakan oleh Amerika Serikat pada September 2016 dimana Pemerintahan Amerika Serikat menyetujui Perjanjian yang dihasilkan oleh UNFCCC, yaitu Paris Agreement pada periode pemerintahan Presiden Obama. Hal tersebut membuktikan bahwa Presiden Obama memang mempunyai arah kebijakan luar negeri yang mendukung pada perbaikan dampak negatif dari perubahan iklim.

Dalam proses pengesahan Paris Agreement terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Presiden Obama, salah satunya adalah hambatan dari dalam Kongres Amerika Serikat itu sendiri. Karena pada tahun 2014 keanggotaan di dalam Kongres berisi 54 dari anggota Senate dan 247 dari anggota House of Representative

merupakan anggota yang berasal dari Partai Republik sehingga membuat Partai Republik menjadi Partai mayoritas di dalam Kongres pada periode kedua pemerintahan Presiden Obama, mayoritas anggota Republik di dalam Kongres dibandingkan dengan Partai Demokrat membuat kebijakan dalam mendukung perbaikan perubahan iklim pun menjadi terhambat. Begitu juga dengan tahun 2016 dimana Partai Republik sekali lagi menjadi Partai mayoritas di dalam kongres yaitu dengan 52 anggota Partai Republik di dalam Senate dan 241 anggota Partai Republik di dalam House of Representative. Dengan adanya mayoritas Partai Republik di kedua kamar dalam kongres tentu semakin menyulitkan Presiden Obama untuk mengesahkan Paris Agreement, terutama dikarenakan kebijakan luar negeri harus terlebih dahulu diproses dan disetujui oleh Kongres terlebih dahulu.

Dengan hilangnya dukungan dari Kongres karena adanya mayoritas dari Partai Republik di House of Representative dan House of Senate, maka Presiden Obama memilih untuk tidak menggunakan mekanisme yang biasanya digunakan dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri dan lebih memilih untuk menggunakan haknya sebagai lembaga eksekutif yaitu Sole Executive Agreement dimana Presiden Obama dapat menyetujui dan mengesahkan suatu perjanjian tanpa masukan dan partisipasi dari Kongres. Keputusan sepihak dari Presiden Obama yang tidak memperhatikan masukan dari kongres tersebut tentu menimbulkan reaksi negatif dari para anggota Kongres.

Sole Executive Agreement sendiri merupakan hak spesial dari Presiden Amerika Serikat yang memberikan wewenang bagi Presiden Obama untuk menyetujui ataupun menyetujui suatu perjanjian sebagai lembaga eksekutif tanpa melalui proses partisipasi dari anggota Kongres. Presiden Obama menggunakan wewenangnya dalam Sole Executive Agreement karena tidak adanya dukungan dari dalam Kongres untuk mengikuti ataupun mengesahkan Paris Agreement.

Amerika Serikat sendiri mempunyai kebijakan dalam negeri yang memberikan otoritas kepada Presiden Obama untuk menggunakan wewenang Sole Executive Agreement nya untuk mengesahkan Paris Agreement.

Banyaknya kebijakan dalam negeri yang memberikan otoritas kepada Presiden untuk mengikuti perjanjian internasional tersebut membuat Presiden Obama dapat mengatasi hambatan yang dihadapinya pada kongres dalam mengesahkan Paris Agreement, yaitu dengan menggunakan wewenangnya dalam Sole Executive Agreement. Presiden Obama telah membawa arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang awalnya tidak mendukung ataupun menyetujui perjanjian yang dihasilkan oleh UNFCCC menjadi mendukung dan bahkan mengesahkannya, yang mana dilakukannya dalam Paris Agreement.

### ***Faktor Amerika Serikat Keluar Dari Paris Agreement***

Amerika Serikat dan Paris Agreement memiliki keterkaitan yang sebenarnya tidak dapat terlepas. Bagaimana tidak, Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang menggagas adanya awareness terhadap perubahan iklim akibat pemanasan global di dunia dan juga sebagai penyuplai dana bagi negara berkembang di dalam Paris Agreement. Beberapa kepala negara Amerika Serikat, khususnya sebelum Donald Trump juga menyetujui adanya perjanjian ini dengan alasan utama yaitu untuk mengurangi adanya perubahan iklim akibat pemanasan global dan emisi gas karbon. Pada bulan Juni di tahun 2017, Donald Trump melakukan walked out dari perjanjian iklim ini. Paris Agreement pun sebenarnya sudah dilakukan sejak lama dan lebih digagas kembali pada tahun 2015. Adanya perjanjian ini memiliki tujuan utama yaitu melihat respon secara global dan universal bagaimana setiap negara memiliki kepekaan terhadap krisis iklim yang terjadi di bumi (McTague, 2020).

Hal tersebut berbeda pada saat Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat dan mengeluarkan kebijakan untuk Amerika Serikat keluar dari Paris Agreement. Dalam hal ini Amerika Serikat sangat berperan sebagai salah satu negara adidaya yang juga ikut mengesahkan Paris Agreement.

Masa pemerintahan Trump membuat Amerika Serikat memang lebih memfokuskan negaranya dalam bidang ekonomi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat. Donald Trump

sendiri memposisikan dirinya untuk tidak terikat di dalam Paris Agreement karena menurutnya hal tersebut merugikan bagi laju ekonomi Amerika Serikat. Melihat dari beberapa presiden yang berasal dari partai yang sama oleh Trump di pemerintahan Amerika Serikat terdahulu, Trump menginginkan bahwa pemerintahannya dapat mengembalikan atau menambah eksistensi Amerika Serikat yang “kuat” dalam bidang perekonomian tetap pada peringkat pertama dunia seperti yang sudah dijalankan sebelumnya oleh Presiden terdahulu dengan kubu yang sama dengan beliau. Karena nya, Trump merasa dengan Amerika Serikat yang memiliki citra besar di dunia kemudian masih tetap terikat dengan Paris Agreement itu adalah hal yang buang-buang waktu. Karena Trump sendiri merasa bahwa, kepentingan masyarakat Amerika Serikat tetap yang utama dan adanya perjanjian tersebut hanya untuk mendapatkan “pujian” dari aktivis global dengan memanfaatkan citra Amerika Serikat sebagai negara maju. Hal tersebut menurut Trump tidak menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi kondisi Amerika Serikat, karena jika memang Amerika Serikat ingin maju itu berarti harus dimulai melalui kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat apalagi ekonominya dahulu. Bagian iklim dan lainnya adalah hal-hal pendukung lain yang menurut Trump hal tersebut tetap dapat dilakukan oleh Amerika Serikat melalui pemerintahan Trump dengan cara yang berbeda tanpa harus sesuai dengan aturan yang ada di Paris Agreement. Point pentingnya adalah Amerika Serikat dapat

tetap mengurangi emisi gas karbon negaranya dengan cara berbeda dari yang dilakukan negara-negara lain di Paris Agreement tanpa harus merugikan keadaan ekonomi pemerintahan Amerika Serikat (Smith 2021).

## **KESIMPULAN**

Paris agreement merupakan sebuah perjanjian yang berfokus pada pengurangan emisi gas karbon. Krisis iklim yang dihadapi oleh masyarakat internasional mengakibatkan masing masing negara memiliki tanggung jawab. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang peduli terhadap isu lingkungan, namun pada pemerintahan Donald Trump, Trump melakukan penarikan diri dari perjanjian Paris karena Amerika Serikat memang lebih memfokuskan negaranya dalam bidang ekonomi dengan tujuan kesejahteraan masyarakat Amerika Serikat. Donald Trump sendiri memposisikan dirinya untuk tidak terikat di dalam Paris Agreement karena menurutnya hal tersebut merugikan bagi laju ekonomi Amerika Serikat.

## DAFTAR PUSTAKA

- John W. Creswell, *Research Design: Qualitative Quantitative & Mixed Methods Approaches*. (Washington DC: SAGE Publications Inc, 2013), 32
- Stephen S. Birdsall, *Garis Besar Geografi Amerika Serikat* (Carolina: John Wiley & Sons, Inc, 1992), 193-194.
- White House, "The Constitution of The United States" ,1995 [artikel online]; tersedia di <https://www.usconstitution.net/const.pdf> Internet; diakses pada 12 Januari 2023
- G. Calvin Mackenzie, *American Government: Politics and Public Policy* (New York: Random House, 1986), 99-101.
- Mildred Amer, "Pages of the United States Congress: Selection, Duties, and Program Administration", Mei 2008 [artikel online]; tersedia di <https://www.senate.gov/reference/resources/pdf/98-758.pdf> Internet; diakses pada 12 Januari 2023.
- Alexander DeConde, Richard Dean Burns, Fredrik Logevall, *Encyclopedia of American Foreign Policy* (Charles Scribner's Sons, 2002), 190.
- Ronja Ritthaler-Andree, "The U.S Climate Policy and The 2016 Presidential and Congressional Elections" ,2016 [artikel online]; tersedia di <http://www.uniheidelberg.de/md/politik/harnisch/mitarbeiter/aa-r2e-no1.pdf> Internet; diakses pada 12 Januari 2023.
- Schreurs, *Environmental Politics in Japan, Germany, and The United States*, 177-178
- White House, "Fact Sheet: United States Support for Global Efforts to Combat Carbon Pollution and Build Resilience" ,2014 [artikel online]; tersedia di <https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2014/11/15/fact-sheet-united-states-support-global-efforts-combat-carbon-pollution-> Internet; diakses pada 12 Januari 2023.
- United Nations Framework Convention on Climate Change, "Paris Agreement – Status of Ratification" ,12 Desember 2015 [artikel online]; tersedia di [http://unfccc.int/paris\\_agreement/items/9444.php](http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php) Internet; diakses pada 12 Januari 2023
- Federal Election Commission, "2014 Election Results" ,2014 [artikel online] tersedia di <https://classic.fec.gov/pubrec/fe2014/tables2014.pdf> Internet; diakses pada 12 Januari 2023
- Valerie Richardson, "White House defends Obama evading Senate on Paris climate deal", *Washington Times*, 29 Agustus 2016, diakses dari <https://www.washingtontimes.com/news/2016/aug/29/obama-will-bypass-senate-ratify-paris-climate-acco/> Pada 12 Januari 2023.
- Glen S. Krutz & Jeffrey S. Peake, *Treaty Politics and The Rise of Executive Agreements* (Michigan: The University of Michigan Press, 2009), 30-34.
- McTague, Tom, dan Peter Nicholas. 2020. *HOW 'AMERICA FIRST' BECAME AMERICA ALONE*. News Global, London: The Atlantic. Diakses 2023. <https://www.theatlantic.com/international/archive/2020/10/donald-trump-foreign-policy-america-first/616872/>.
- Smith, Don C. 2021. "The United States re-engages with the world on climate change. But the question remains: is the US a dependable long-term

partner?” Disunting oleh University of Denver Sturm College of Law Journal of Energy & Natural Resources Law. JOURNAL OF ENERGY & NATURAL RESOURCES LAW (Routledge Taylor & Francis Group) 39 (No 1): 1-11. <https://www.tandfonline.com/doi/pub/10.1080/02646811.2021.1872184?needAccess=true>